



Analisis Gender terhadap Preferensi Ibu Rumah Tangga sebagai Penerima Program Keluarga Harapan

Mella Putri Ayuningtyas

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Zulkipli Lessy

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email Korespondensi : mella.putri.tyas@gmail.com, lessyzulkipli@gmail.com

Abstract This study aims to explain why the Family Hope Program (PKH) specifically targets housewives as beneficiaries, as well as to describe the empowerment efforts carried out by PKH Kapanewon Jetis Yogyakarta. Data collection methods used were interviews and relevant previous research, with descriptive qualitative analysis. The results showed that PKH Kapanewon Jetis Yogyakarta not only contributed social funds, but also empowered people in various aspects such as health counseling for pregnant women, empowering MSMEs, and educational counseling. Until now, this program has empowered nearly 4,000 Beneficiary Families (KPM) spread across four sub-districts. Empowerment is carried out through the division of KPM into groups in each sub-district. The main beneficiaries are adult women, because their roles and responsibilities within the household are considered more targeted. This approach is in accordance with Presidential Instruction (Inpres) Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming which emphasizes equal rights of women and men in various aspects of life.

Keywords: Family Hope Program (PKH), Women's Empowerment, Gender Equality

Abstrak Program Keluarga Harapan menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan. Ide dari program tersebut berakar dari upaya pembangunan PBB yang menyangkut delapan hal, beberapa diantaranya yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dan juga mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Program Keluarga Harapan (PKH) secara khusus menyasar ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat, serta untuk menggambarkan upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh PKH Kapanewon Jetis Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelitian terdahulu yang relevan, dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerima manfaat utama dari PKH adalah wanita dewasa, karena peran dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga dianggap lebih tepat sasaran. Wanita dewasa dianggap mendominasi kegiatan rumah tangga dengan aktivitas-aktivitasnya, seperti memasak, mengasuh, membersihkan rumah, bahkan dalam urusan ekonomi seperti perbendaharaan rumah tangga. Wanita dianggap lebih selektif dalam penggunaan dana rumah tangga karena digunakan sebagaimana mestinya dan memprioritaskan urusan rumah tangga dibanding yang lainnya. Pada Programnya, PKH Kapanewon Jetis Yogyakarta tidak hanya memberikan sumbangan dana sosial, tetapi juga melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek seperti penyuluhan kesehatan ibu hamil, pemberdayaan UMKM, dan penyuluhan pendidikan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

PKH (Program Keluarga Harapan) adalah sebuah program sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Adanya PKH menjadi salah satu upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium oleh PBB. Upaya pembangunan PBB mencakup delapan tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian

Received: April 30, 2024; Accepted: Juli 02, 2024; Published: September 30, 2024;

* Mella Putri Ayuningtyas, mella.putri.tyas@gmail.com

anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan (Nainggolan, dkk; 2012).

Sasaran PKH yaitu para ibu rumah tangga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Untuk menjadi peserta PKH, ada tiga komponen yang harus dipenuhi. Komponen pertama adalah kesehatan, yang mencakup keberadaan ibu hamil, memiliki anak balita, dan memiliki anak usia sekolah. Komponen kedua adalah pendidikan, yang melibatkan keberadaan anak-anak yang bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Komponen ketiga adalah kesejahteraan sosial, yang mencakup memiliki anggota keluarga yang menderita disabilitas berat dan memiliki anggota keluarga lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas.

Hal tersebut berarti adanya PKH ini sekaligus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, karena dalam PKH terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana sasarannya adalah wanita yang sudah dewasa (ibu, nenek, tante, bibi, kakak perempuan). Perempuan menjadi sasaran karena perempuan merupakan simbol kemakmuran keluarga dan perempuanlah yang menjalankan peran domestik rumah tangga.

Program Keluarga Harapan memberi peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam program PKH, perempuan tidak hanya mendapat bantuan sosial saja, tetapi juga mendapat program pemberdayaan di berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa penerima manfaat hanya ditujukan pada perempuan dan bukan pada laki-laki. Berdasarkan jawaban pendamping PKH Jetis, Yogyakarta, dijelaskan bahwa perempuan dianggap lebih efektif dalam mengelola dana ekonomi keluarga karena urusan perempuan lebih fokus pada domestik keluarga seperti perbelanjaan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan memberikan program keluarga kepada perempuan juga diharap dapat mengurangi adanya ketimpangan gender dalam rumah tangga dan masyarakat, mengingat perempuan yang sering dijadikan posisi kedua dan diremehkan dalam masyarakat.

Dengan penjelasan di atas, menimbulkan pertanyaan oleh peneliti bahwa apakah benar adanya program keluarga harapan dapat mengatasi kesenjangan gender di keluarga? Dan apakah dengan adanya program ini dapat memperkuat dominasi ibu di keluarga?

Metode Penelitian

Dalam rangka itu, peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer melalui proses wawancara serta data sekunder didapat dari penelitian sebelumnya. Melalui tinjauan mendalam terhadap literatur dan data terkait, penelitian ini diharap dapat memberikan analisis komprehensif tentang peran dan dampak Program Keluarga Harapan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan mencapai kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (KPM). Dilansir dari web Kemensos.go.id, bahwa PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sasaran program ini yaitu keluarga miskin terutama ibu hamil, anak-anak, disabilitas, dan lansia yang telah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah. Tujuan adanya bantuan sosial adalah

Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH Jetis, Yogyakarta, pemberian bantuan sosial dilakukan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening penerima atau keluarga yang bersangkutan. Situasi ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan penerima manfaat karena kebijakan sebelumnya melakukan pencairan dana secara tunai di PT. Pos Indonesia, yang dianggap lebih mudah oleh penerima manfaat. Pemberian dana secara tunai dianggap lebih efektif daripada non-tunai, terutama dengan mempertimbangkan bahwa sebagian penerima manfaat adalah lansia yang umumnya memiliki pemahaman yang terbatas terkait penggunaan mesin ATM. Akibatnya, tidak jarang lansia meminta bantuan keluarganya untuk mengambil dana tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus dimana dana tidak sampai kepada penerima manfaat karena campur tangan keluarga. Oleh karena itu, penyelenggara program telah menugaskan pendamping PKH untuk menindaklanjuti setiap

pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa dana tersebut diterima oleh pihak yang berhak menerimanya.

Selain bantuan uang, Program Keluarga Harapan juga diberikan berupa program-program pendampingan dan pemberdayaan. Penelitian yang dilakukan pada PKH Kapanewon Jetis Yogyakarta menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan dalam banyak aspek, seperti penyuluhan pada ibu hamil, pemberdayaan UMKM masyarakat, penyuluhan pendidikan, dan lain-lain. Hingga saat ini, Kapanewon Jetis telah mengakomodasi hampir 4000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di empat kelurahan. Proses pemberdayaan KPM dilakukan dengan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelurahan memiliki antara dua hingga tiga kelompok, dan setiap kelompok tersebut terdiri dari lebih dari sepuluh anggota. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam berbagai bidang, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka dan mendorong kesetaraan gender.

PKH Kapanewon Jetis menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan sesuai dengan target yang dituju. Salah satu program yang ada di bidang kesehatan adalah program agen kesehatan yang dilakukan bekerja sama dengan puskesmas. Program ini melibatkan pelatihan kepada ibu rumah tangga mengenai penggunaan alat-alat pengecekan kesehatan, seperti tensi darah dan alat untuk mengukur kadar gula darah dan asam urat. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada ibu rumah tangga agar dapat mendeteksi penyakit sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu individu yang tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, dengan memberikan akses pemeriksaan kesehatan melalui kader-kader PKH.

Selain program agen kesehatan, PKH Kapanewon Jetis juga menjalin kerjasama dengan BAZNAS untuk menyelenggarakan penyuluhan dan edukasi kesehatan. Penyuluhan ini mencakup isu-isu kesehatan yang sedang dibicarakan pada saat itu. Melalui kerjasama ini, PKH berupaya memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat mengenai isu-isu kesehatan terkini. Dengan adanya program agen kesehatan dan kerjasama dengan BAZNAS, PKH Kapanewon Jetis berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam hal kesehatan. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat melakukan pencegahan penyakit secara dini melalui pemeriksaan kesehatan dan memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi kesehatan yang relevan.

Dalam Kapanewon Jetis, program-program ekonomi juga diadakan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu program yang dilaksanakan adalah pelatihan pembuatan produk-produk UMKM, seperti makanan ringan dan tas yang terbuat dari limbah plastik, serta produk lainnya. Setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil menciptakan produk-produk tersebut dan memiliki keyakinan untuk memasarkannya, Program Keluarga Harapan (PKH) turut memberikan pendampingan dengan menyediakan sertifikat halal dan sertifikat lainnya, agar produk yang dihasilkan oleh KPM memenuhi standar dan bisa dipasarkan dengan percaya diri.

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ada program kesejahteraan sosial yang fokus pada pendampingan lansia dan anak-anak. Di Kapanewon Jetis, PKH bekerjasama dengan Diferensia Foundation untuk memberikan pendampingan kepada lansia-lansia. Di wilayah ini, terdapat lansia yang masih aktif berjualan, misalnya di pasar. Namun, ketika mereka memasuki usia lanjut, seperti 70 tahun, seringkali sulit bagi mereka untuk tetap produktif dan mendapatkan penghidupan yang memadai. Oleh karena itu, PKH Jetis memberikan bantuan melalui kerjasama dengan Diferensia Foundation, yang bertugas memantau dan mendata kebutuhan-kebutuhan lansia. Data ini kemudian dilaporkan kepada Diferensia Foundation untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lansia. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberdayakan lansia agar tetap merasa bernilai dan mendapatkan perhatian serta bantuan yang mereka butuhkan.

Selain itu, PKH Jetis juga memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang kurang mampu atau yang tidak mau bersekolah. Program ini bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pendidikan anak-anak tersebut dan mendorong mereka untuk kembali bersekolah. PKH Jetis memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak-anak ini, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun program-program lain yang dapat memotivasi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan adanya pendampingan khusus bagi lansia dan upaya untuk menangani masalah pendidikan anak-anak, PKH Jetis berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Melalui kerjasama dengan Diferensia Foundation, program ini berusaha untuk memberikan perhatian dan bantuan yang tepat sasaran kepada lansia dan anak-anak yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peran Gender

Gender bukanlah semata soal jenis kelamin, meskipun terkait dengan itu (Santoso, 2016). Konsep gender bukanlah terbatas pada laki-laki dan perempuan, melainkan konsep yang mengacu pada peran, identitas, dan ekspresi sosial yang secara budaya ditetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Ini bukan hanya tentang perbedaan biologis antara jenis kelamin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengartikan dan memahami peran gender. Peran gender dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang ditetapkan masyarakat. Masing-masing budaya memiliki konstruksi dan persepsi yang berbeda mengenai apa yang dianggap “maskulinitas” dan “feminitas”.

Konstruksi sosial yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menghasilkan peran gender yang berbeda pula. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan gender yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan sering kali dinilai lemah dan dibatasi dalam ruang geraknya dengan alasan bahwa itulah kodratnya sebagai manusia. Mereka sering kali diidentifikasi dengan peran domestik dalam rumah tangga, yang membatasi mereka untuk hanya beraktivitas di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Selain itu, perempuan juga sering kali dikendalikan oleh laki-laki yang dipandang sebagai pemimpin, pelindung, dan sebagainya. Padahal, Menurut Nurhayati (2005), posisi laki-laki dan perempuan adalah sejajar dalam pandangan kesetaraan gender. Tidak ada penilaian posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan, serta tidak ada kontrol dan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Melsi Syawitri & Afdal, 2020).

Banyak ibu rumah tangga menjadi penerima manfaat utama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) karena adanya pandangan bahwa wanita dominan dalam manajemen rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Mbak Ririn yaitu salah satu pendamping PKH Jetis, menyampaikan bahwa, wanita menjadi Penerima manfaat karena harapannya ketika dana diberikan kepada mereka, dana tersebut akan digunakan untuk keperluan keluarga. Sebaliknya, terdapat kekhawatiran bahwa jika dana diberikan kepada laki-laki, dana tersebut mungkin akan disalahgunakan untuk keperluan di luar rumah tangga, seperti membeli rokok, jajan, berjudi, dan sebagainya. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), tidak hanya dalam proses penerimaan dana tunai, tetapi juga dalam kegiatan penyuluhan dan lainnya, seringkali terjadi kendala ketika perempuan tidak dapat hadir. Dalam situasi seperti ini, sering kali suami

atau laki-laki dalam keluarga enggan menggantikan kehadiran istrinya. Meskipun ada beberapa kasus di mana suami mau menghadiri, namun frekuensi kehadirannya jarang terjadi.

PKH dan Kesetaraan Gender

Di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional (Sekretariat Kabinet, 2000). Pengarusutamaan gender adalah pendekatan yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak yang sama dan perlu diberikan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mengidentifikasi, menghilangkan, dan mencegah ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi berdasarkan perbedaan gender. Dengan ini berarti pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik, masyarakat akan menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Seiring dengan berdirinya Program Keluarga Harapan (PKH), wanita semakin memperoleh keyakinan dalam peran mereka di rumah tangga dan mampu berkontribusi dalam perekonomian keluarga. Hal ini berarti peran tradisional maskulinitas yang dimiliki oleh laki-laki dalam rumah tangga menjadi sedikit terancam, karena wanita juga turut bekerja dan berperan dalam menopang keuangan keluarga. Laki-laki mungkin merasa khawatir akan kehilangan maskulinitas mereka karena tanggung jawab ekonomi tidak hanya terletak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada kontribusi istrinya. Hal ini dapat mengakibatkan sedikit kesulitan dalam mengarahkan atau mengendalikan posisi istrinya, karena kedudukan mereka dalam dominasi rumah tangga menjadi sejajar.

Meskipun hal ini terjadi, perubahan ini juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih setara antara suami dan istri dalam rumah tangga. Kedua belah pihak dapat saling berkontribusi dan saling mendukung dalam mengambil keputusan dan

bertanggung jawab terhadap keluarga mereka. Perkembangan ini menandai pergeseran dalam dinamika gender di masyarakat, dan penting untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih seimbang dan saling menghormati antara pasangan dalam rumah tangga. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan gender di keluarga dengan mendorong pemberdayaan perempuan dan memperkuat peran mereka dalam ekonomi keluarga. Namun, program ini tidak bertujuan untuk memperkuat dominasi ibu di keluarga, melainkan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua anggota keluarga.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, melalui PKH, transfer tunai diberikan kepada ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat utama. Ini dapat memberikan peluang ekonomi kepada perempuan untuk mendukung kebutuhan keluarga mereka dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dengan mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi, perempuan dapat menjadi lebih mandiri dalam pengambilan keputusan finansial dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Namun, yang terpenting adalah program ini juga berupaya meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. PKH tidak dimaksudkan untuk menciptakan dominasi satu pihak, tetapi untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga merasakan manfaat dari program tersebut.

Tidak hanya dalam dominasi keluarga, PKH juga menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan. Dalam konteks ini, program ini dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensi mereka, mengambil peran aktif dalam masyarakat, dan mengatasi stereotip gender yang membatasi.

Secara keseluruhan, PKH dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan mendorong kesetaraan gender. Namun, penting untuk tetap berhati-hati dalam menjaga keseimbangan dan menghindari pembingkai program sebagai alat untuk memperkuat dominasi satu pihak di keluarga. Tujuan utama program ini adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua anggota keluarga.

KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, yang diberikan berupa uang tunai dan pendampingan pemberdayaan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Kelompok penerima bantuan ini

terdiri dari wanita dewasa yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, seperti ibu, bibi, tante, atau nenek. Selain itu, program ini juga menjangkau anak-anak, lansia, dan disabilitas sebagai sasaran penerima manfaat.

Dalam PKH Kapanewon Jetis Yogyakarta, bantuan diberikan dalam bentuk dana sosial dan pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Di bidang kesehatan, dilakukan penyuluhan bekerjasama dengan puskesmas mengenai penggunaan alat tes kesehatan seperti tensi darah, alat cek kadar gula, dan asam urat. Di sisi ekonomi, program ini memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh ibu-ibu. Pada bidang pendidikan, ibu-ibu yang memiliki anak yang putus sekolah atau enggan bersekolah karena berbagai alasan, mendapatkan dukungan untuk mengembalikan anak-anak mereka ke sekolah.

Program PKH secara khusus memilih wanita sebagai penerima manfaat karena wanita dianggap sebagai kunci manajemen keuangan keluarga yang mendominasi peran dalam rumah tangga. Hal ini dianggap lebih tepat sasaran, karena jika bantuan diberikan kepada laki-laki, ada kekhawatiran bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pribadi daripada kebutuhan rumah tangga. Selain itu, melalui program ini, peran dan derajat perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat dapat ditingkatkan. Stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan hanya memiliki peran dalam pekerjaan domestik seperti memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah dapat diubah.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2019). Program Keluarga Harapan (PKH). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

Nainggolan, T. (2012). Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada rumah tangga sangat miskin di tujuh provinsi. Jakarta: P3KS Press.

Santoso, W. M. (2016). Penelitian dan pengarusutamaan gender: Sebuah pengantar. LIPI Press.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. (2000). Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. <https://setjen.kemenkeu.go.id/api/Medias/27531226-a757-4e0c-9341-a3056dddea48>

Syawitri, M., & Afdal. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(1).

Nainggolan, T. (2019). Aspek gender dalam Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosio Informa*, 5(1).